# Analisis Ketimpangan Ekonomi Antara Kelompok Kaya dan Kelompok Miskin sebagai Dampak dari Wabah Covid 19 di Indonesia

Riska Dwi Lutfianti (220321100072)

dwi042035@gmail.com

## PENDAHULUAN

### Later Belakang

Pandemi Covid-19 merupakan wabah mematikan yang menjadi ancaman bagi banyak pihak. Penyakit yang pertama kali ditemukan di China ini telah mempengaruhi banyak aspek seperti ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan. Indonesia adalah salah satu negara Asia dengan tingkat infeksi COVID-19 yang relatif tinggi. Hal ini mendorong pemerintah mengambil tindakan untuk memutus mata rantai penularan. Imbauan pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menerapkan social distancing seperti halnya PSBB dan PPKM. Namun, langkah-langkah yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah memiliki efek negatif yang tidak terduga terhadap perekonomian.

Pembatasan pergerakan mempersulit masyarakat untuk memperoleh penghasilan, terutama bagi masyarakat yang tingkat keuangannya berada di interval menengah dan bawah, rata-rata bekerja sebagai kurir, buruh kasar sederhana, serabutan. Banyak pekerjaan di luar ruangan yang terpaksa diberhentikan, yang lebih buruk lagi, masyarakat tersebut tidak terlalu banyak mengerti mengenai teknologi, sehingga alternatif pendapatannya berkurang. Fenomena ini disebabkan oleh masyarakat yang bercirikan rendahnya sumber daya manusia, rendahnya aset fisik dan finansial serta rendahnya keterampilan.

Mengenai dampak ekonomi lainnya, menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), pandemi disertai dengan risiko krisis ekonomi yang parah, ditandai dengan terhentinya kegiatan dan kegiatan produksi tertentu. Jika ini berkelanjutan, dapat menyebabkan pengurangan produksi di berbagai negara sebesar seperlima hingga seperempat, menurut perkiraan OECD. Aknolt Kristian Pakpahan mengatakan, pandemi Covid-19 memiliki beberapa konsekuensi, antara lain bagi sektor pariwisata dan investasi bisnis. Keberadaan UMKM di Indonesia mendominasi dan menjadi tulang punggung perekonomian yang berdampak signifikan terhadap nilai usaha, produksi secara keseluruhan dan sebagian tenaga kerja yang harus dirumahkan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan pembatasan pergerakan dengan langkah-langkah lain untuk mengatasi permasalahan di atas.

Implementasi kebijakan ketimpangan, khususnya ketimpangan ekonomi di Indonesia, sejauh ini belum berhasil. Pandemi Covid-19 memang menjadi masalah besar karena berdampak pada banyak aspek, sehingga bisa dikatakan pemerintah belum siap menghadapi kekacauan ini. Namun, seiring dengan memburuknya situasi, dengan oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan kesulitan tersebut, paham “yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin” terlihat jelas di masa Covid-19 ini. Terlihat banyak orang menimbun kebutuhan kesehatan seperti masker, yang akan dijual dengan harga lebih tinggi, selama pandemi. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah hanya dapat pasrah begitu saja karena tidak mampu melakukan hal yang sama, tetapi mereka tetap harus membelinya untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari yang kini sudah terbatas.

Di Indonesia, selama Covid-19, ketimpangan muncul tidak hanya antara warga negara dan orang miskin lainnya, tetapi juga antara penguasa yang mengalami peningkatan kekayaan dan orang yang mengalami peningkatan kemiskinan. Peningkatan sepihak ini menimbulkan ketidakpercayaan dan kecemburuan sosial di antara populasi pejabat yang bertugas melindungi rakyatnya, terutama dari kemiskinan. Menurut Syawie (2011), gambaran kemiskinan sangat kontras karena sebagian anggota masyarakat hidup berkelimpahan sementara yang lain hidup dalam kemiskinan.

Melihat fenomena di atas, terdapat ketimpangan lain di Indonesia yang juga mendukung munculnya ketimpangan ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, ketimpangan pembangunan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pembangunan sangat jelas dirasakan oleh masyarakat di luar Jawa, dimana pembangunan daerah sangat mendukung masyarakat dari segi ekonomi, misalnya koneksi jalan yang baik, internet yang lancar, yang mendatangkan banyak kegiatan manufaktur, sehingga permintaan. Tenaga kerja bertambah. Ketika suatu daerah memiliki internet yang lancar, sangat jarang ditemukan masyarakat yang tidak berpengalaman dalam bidang teknologi, khususnya teknologi komunikasi yang sangat dibutuhkan untuk bertukar pesan dan untuk kegiatan jual beli di masa pandemi ini. Ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dapat dilihat pada rasio Gini Statistik Swedia (BPS). Rasio Gini sebelum kedatangan Covid 19 pada September 2019 adalah 0,380. Setelah Covid-19 di awal tahun 2020 lalu naik menjadi 0,381

Parahnya terdapat 4.444 Pegawai Ngeri Sipil yang mengalami peningkatan kekayaan disamping keadaan rakyat biasa yang mengalami penderitaan akibat penurunan pendapatan. Karyawan saat ini dipersulit dengan etika politik. Berawal dari LHKPN menelaah peningkatan aset para pejabat negara. Selama pandemi, pejabat negara banyak yang mengalami peningkatan kekayaan dengan angka 70%. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 2,76 juta pada september 2020 dibandingkan dengan september 2019. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut terbilang signifikan.

**Rumusan Masalah**

1.Bagaimana ketimpangan terjadi di Indonesia?

2.Apa saja penyebab dari ketimpangan ekonomi di Indonesia

3.Bagaimana pemerintah memberikan solusi ketimpangan yang terjadi di Indonesia?

**Tujuan Penelitian**

1.Untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi di Indonesia

2.Untuk menganalisis penyebab dari ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia

3.Untuk mengetahui solusi-solusi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan

## TINJAUAN PUSTAKA

### Ketimpangan di Indonesia

Ketimpangan pendapatan di wilayah Indonesia merupakan ketimpangan yang paling buruk dibandingkan dengan negara berkembang atau maju lainnya karena Indonesia masih jauh lebih tinggi ketimpangannya dari China dan Thailand yang ketimpangan antar wilayah relatif tinggi. (Lessman dalam kutipan Muhammad Firdaus (2013)).

Ketimpangan sosial adalah keadaan tidak seimbangnya suatu kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Ketimpangan sosial muncul ketika hal-hal yang penting bagi masyarakat didistribusikan secara tidak benar. Perbedaan ini seringkali terkait dengan perbedaan yang muncul dalam istilah moneter yang sangat realistis, seperti kekayaan. Terutama ketika datang ke perbedaan keuangan.

Ketimpangan ekonomi merupakan masalah yang cukup rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang memengaruhinya tidak hanya berasal dari sumber daya manusia melainkan juga faktor alam seperti potensi sumber daya alam serta keadaan geografis suatu wilayah. Apabila hal ini ditambah dengan ketidakmerataan pembangunan, maka akan menyebabkan ketimpangan wilayah yang signifikan dengan wilayah lainnnya (Ilham, 2015)

Ketimpangan ekonomi di Indonesia sering dikaitkan dengan kesenjangan pendapatan antar masyarakat. Ketimpangan pendapatan sendiri merupakan distribusi pendapatan nasional yang tidak proporsional antara rumah tangga yang berbeda dalam suatu negara (Todaro & Smith, 2011). Menurut Kuncoro (2003), ketimpangan mengacu pada taraf hidup relatif seluruh masyarakat. Menggunakan beberapa definisi ketimpangan pendapatan, dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan mengacu pada perbedaan besar antara berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan beberapa orang, semakin besar perbedaan pendapatannya.

Menurut Adelman dan Morris (1973), yang dikutip oleh Arsyad (2016), ada delapan penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang, yaitu:1)Pertumbuhan penduduk yang melesat menjadi penyebab menurunnya pendapatan per kapita2)Inflasi3)Investasi4)Kesenjangan pemabngunan antar wilayah 5)Mobilisasi rendah6)Devaluasi akibat dari ketidakstabilan permintaan barang ekspor negara berkembang dan yang ke iadalah 7) Hancurnya industri kerajinan rakyat

### Pandemi covid 19

Covid 19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS-COV2 dan mengganggu saluran pernafasan. Covid 19 tergolong penyakit yang menular melalui infeksi droplet dari hidung dan mulut yang sedang menderitanya. Penyakit ini selain berakibat pada penularan kesehatan juga berakibat pada penularan kemiskinan. Definisi kemiskinan sering dipahami sebagai ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Mengetahui luasnya dampak Covid 19, masyarakat lebih berhati-hati dalam mengonsumsinya. Orang-orang hanya menghabiskan uang mereka untuk kebutuhan dasar.

Situasi ini membuat perekonomian berjalan lambat. Bahkan pada tahun 2020, pertumbuhannya mencapai 2,07%. Prakiraan industri untuk tahun 2020 telah berubah secara radikal karena peristiwa luar biasa yang tidak terduga ini. Karena asumsi pasar yang berubah dan rantai pasokan yang tidak jelas, investor juga lebih berhati-hati dalam mengamankan modal mereka (Pepinsky dan Wihardja 2011). Di negara bagian ini, pihak yang paling terdampak adalah kelompok rentan yang mengalami dampak negatif dibandingkan kelompok kaya akibat pandemi.

Oxfarm, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang terlibat dalam kerja sama pembangunan, manajemen bencana, dan advokasi, menyatakan dalam laporan Oktober 2020 Memerangi Kesenjangan di Masa COVID 19 bahwa Covid-19 berdampak besar pada negara-negara yang tidak siap menghadapinya. Pandemi ini, hanya satu dari enam negara sample pengamatan yang mengalokasikan anggarannya yang memadai pada sektor kesehatan, hanya 1/3 angkatan kerja global yang memiliki perlindungan sosial. Akibatnya, ketika ada masalah kesehatan, masih adanya biaya ekonomi yang harus ditanggung dalam proses pemulihan. Hal ini yang akan berujung pada meningkatnya kesenjangan ekonomi.

**Variabel dan Indikator yang dibahas**

Variable yang dibahasa pada penelitian ialah ketimpangan ekonomi khususnya ketimpangan pendapatan. Selisih pendapatan di Indonesia tidak dikenali secara langsung melalui spekulasi, melainkan melalui indikator Indeks Gini. Indikator ini digunakan untuk mengukur bagaimana ketimpangan pendapatan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Indeks gini bervariasi antara 0-1. Apabila indeks gini menunjukkan angka 0 maka suatu wilayah tersebut pemerataannya sempurna dan ketika menunjukkan angka 1 maka suatu wilayah ketimpangannya mutlak sempurna dengan nilai indeks gini kurang dari 0,3 termasuk dalam golongan ketimpangan rendah, 0,3 sampai 0,5 termasuk dalam golongan ketimpangan rendah dan lebih besar dari 0,5 termasuk dalam golongan ketimpangan tinggi

**Penelitian Terdahulu**

Studi lintas wilayah Perancis, Ginsburgh et al. (2021) menemukan bukti yang menunjukkan bahwa sebagian besar krisis memperburuk ketimpangan, karena orang yang relatif lebih kekurangan kebanyakan memiliki kesehatan yang kurang baik, sering terkendala kredit dan berisiko lebih besar kehilangan pekerjaannya

Beberapa peneliti juga telah mengemukakan bukti empiris bagaiman dampak Covid 19 terhadap kemiskinan. Studi pertama oleh Kumar & Pinky (2020) yang mengamati wilayah Bangladesh, menyatakan bahwa pandemi Covid 19 telah mengurangi kesejahteraan ekonomi, seiring peningkatan ini terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi dan pengangguran di tingkat nasional.

Studi kedua dilakukan oleh Chitiga-Mabugu et al. (2021) dengan pengamatannya pada negara Afrika menyatakan bahwa pandemi mendorong lebih banyak rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut menyebabkan kehawatiran publik, selain risiko kesehatan juga risiko pada kegiatan ekonomi yang berakibat pada menurunnya

produktivitas. Melihat kondisi tersebut, kebijakan pemerintah untuk memutus angka penyebaran Covid 19 meliputi pembatasan wilayah dan sosial. Namun, kebijakatan tersebut menimbukan krisis sosial maupun ekonomi sehingga terjadi kerugian yang tidak proporsional.

Sebuah studi tahun 2020 oleh Jack Cordes dan Marcia C. Castro yang menggunakan analisis spasial klaster Covid-19 dan faktor kontekstual di New York City menggunakan data kode pos pada penelitiannya, studi tersebut mendapatkan hasil bahwa klaster dengan skor tes lebih rendah memiliki tingkat hasil positif Covid-19 yang lebih rendah, yang sesuai dengan kelompok yang memiliki pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi, dimana didapati oleh orang kulit putih. Sementara itu, klaster dengan tingkat tes tinggi dan proporsi infeksi positif Covid-19 yang tinggi berasal dari kelompok kulit hitam dan tidak memiliki asuransi kesehatan.

## METODE ANALISIS

Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder periode 2010-2019 (pra pandemi) dan tahun 2020 dari periode pandemi Covid-19. Pendekatan kualitatif mengacu pada data atau informasi yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Data sekunder adalah informasi yang peneliti kumpulkan dari sumber yang ada. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai literatur jurnal ilmiah, yang direview dan didiskusikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut data yang menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia periode maret dan september 2015-2020

Berdasarkan informasi di atas, jumlah penduduk miskin meningkat 2,76 juta jiwa dari September 2019(Sebelum Covid) ke September 2020(Pasca Covis). Peningkatan jumlah

penduduk miskin terbagi antara peningkatan penduduk mikin perkotaan dan pedesaan, dengan peningkatan angka sebesar 0,01% di perkotaan dan penurunan angka sebesar 0,10%. Di pedesaan. Melihat pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penduduk miskin di dominasi oleh penduduk perkotaan. Hal ini terjai karena masih banyaknya masyarakat perkotaan yang berpenghasilan rendah dengan biaya hidup yang tinggi.

Garis kemiskinan menjadi batas tingkatan minmum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk mendapatkan standar hidup yang mencukupi. Garis kemiskinan kini naik dari Rp 458.947 pada bulan Maret, kenaikan tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya kategori makanan menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 73,96 persen. Sedangkan kekayaan sekitar 58% menteri meningkat lebih dari 1 crore atau sekitar 180 crore dan 26% menteri meningkat kurang dari 1 crore atau sekitar 180 crore dan hanya 3% menteri yang dinyatakan telah merusak harta bendanya. Total peningkatan kekayaan adalah 45% anggota DPR dengan kekayaan di atas $1 miliar, 38% meningkat dengan kurang dari $1 miliar, dan 11% lainnya mengatakan kekayaannya menurun (Hadiwardoyo, 2020). Jumlah orang miskin kembali meningkat pada September 2020. Negara ini mencerminkan hukum rimba, yakni hukumnya identik dengan siapa yang kuat memerintah dan mengatur yang lemah. Bertambahnya jumlah orang miskin yang dibarengi dengan bertambahnya kekayaan orang kaya lainnya dan pejabat pemerintah semakin memperparah kondisi ketimpangan ekonomi, dimana ketimpangan ekonomi di Indonesia didominasi oleh ketimpangan pendapatan masyarakat.

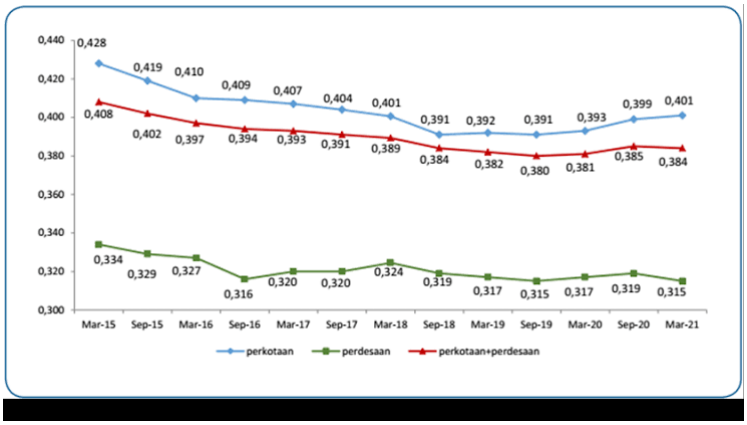


Berdasarkan diagram di atas ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan di tengah panemi Covid-19, tercermin dari rasio gini garis warna merah yang menunjukkan rasio gini perkotaan dan pedesaan sebesar 0,384 pada Maret 2021. Penyumpangan ketimpangan tertinggi ialah pada wilayah perkotaan dengan rasio gini 0,401 yang ditunjukkan pada garis biru dan sisanya disumbang pedesaan dengan angka relatih lebih rendah yakni 0,315. Pada diagram diatas juga menunjukkan peningkatan rasio gini pada Maret 2020 pasca pandemi dari angka 0,380 sebelum pandemi menjadi 0,38.

Ketimpangan ini menjadi kontroversi baru yang sangat ironis karena banyaknya pejabat negara dan masyarakat kaya yang mengalami kenaikan kekayaan di samping kondisi masyarakat yang krisis ekonomi. Peningkatan sepihak ini menciptakan ketidakpercayaan sosial dan kecemburuan publik terhadap pejabat yang bertugas melindungi rakyatnya, terutama dari kemiskinan, sehingga menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap

pemerintah. Menurut Syawie (2011), gambaran kemiskinan sangat kontras, karena sebagian anggota masyarakat hidup berkelimpahan sementara sebagian lainnya hidup serba kesulitan.

Parahnya terdapat 4.444 Pegawai Ngeri Sipil yang mengalami peningkatan kekayaan disamping keadaan rakyat biasa yang mengalami penderitaan akibat penurunan pendapatan. Karyawan saat ini dipersulit dengan etika politik. Berawal dari LHKPN menelaah peningkatan aset para pejabat negara. Selama pandemi, pejabat negara banyak yang mengalami peningkatan kekayaan dengan angka 70%. Disamping itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 2,76 juta pada september 2020 dibandingkan dengan september 2019. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut terbilang signifikan. Sebenarnya, tidak ada larangan Pegawai Negeri Sipil khususnya pejabat negara memeiliki kekayaan, apabila kekayaan tersebut banyak yang diperoleh dari penghasilannya yang lain seperti perusahaan yang dimili, dll dan tidak merugikan atau bahkan mengambil hak warganya.

Banyak perubahan signifikan yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Terbatasnya aktivitas masyarakat akibat dampak pandemi yang menyerang kesehatan fisik dan adanya kebijakan restriktif pemerintah yang membatasi perkembangan ekonomi dan bidang sosial, sehingga kemrosotan nilai sosial dan ekonomi di masyarakat semakin nyata.

Adapun mekanisme pengaruh Covid 19 terhadap kemiskinan dalam gambar

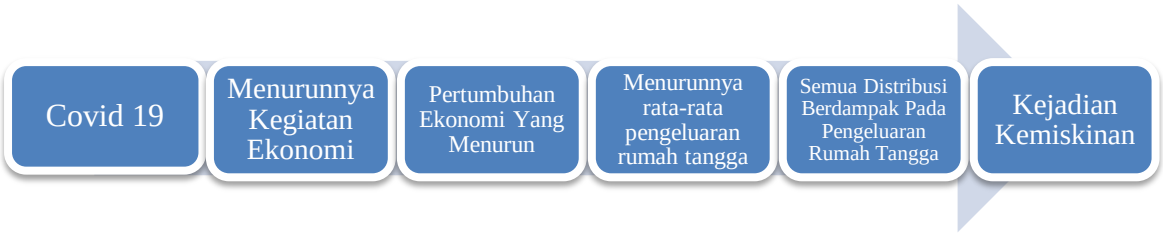


Bagan mekanisme di atas menunjukkan Covid-19 sebagai penyebab penurunan kegiatan ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Penurunan ini disebabkan oleh guncangan penawaran dan permintaan yang mana akan berdampak pada pengeluaran rumah tangga per kapita dan akan berujung pada peningkatan angka kemiskinan

Ketimpangan/kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia saat pandemic Covid 19 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. **Ketidaksiapan dalam menerima perubahan**

   Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang tiba-tiba dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dan tidak dapat diprediksi oleh siapa pun. Khususnya di bidang ekonomi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi akan dramatis di tahun 2020. Penyebabnya tak lain ialah Covid 19. Padahal pemerintah memprediksi di awal tahun 2020 Indonesia ekonomi bisa tumbuh hingga 5,3% per tahun atau lebih dari tahun 2019, pertumbuhan ekonomi yang terealisasi hingga Wabah pandemi Covid-19 sebesar 5,02%, mengancam banyak aspek terutama perekonomian. dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menurun secara

signifikan dari minus 2,2 persen menjadi minus 1,7 persen (Mahadi, 2020). Memprediksi kecepatan penurunan yang cukup mengkhawatirkan, sehingga memaksa orang untuk menuntut dan beradaptasi menghadapi perubahan.

Tuntutan perubahan, membuat ketidaksiapan terhadap masalah pandemi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah. Masyarakat yang awalnya bergantung dengan pekerjaan yang gajinya tidak seberapa serta tidak membutuhkan banyak kemampuan harus memutar otaknya agar dapat bertahan hidup ditengah pandemi Covid 19, yang mengharuskan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Perubahan yang paling dapat dirasakan ialah penggunaan media online, mulai dari kegiatan pendidikan hingga ekonomi. Masyarakat yang awam terhadap media ini, tentunya akan kesulitan beradaptasi, orang tua yang harus mengerti mengenai sistem online pembelajaran anaknya, banyaknya kegiatan yang hanya diperbolehkan secara online serta kegiatan ekonomi yang tetap terselamatkan ketika dilakukan melalui media online, dari beberapa contoh tersebut memperlihatkan, bahwa masyarakat diharuskan untuk mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini.

**2. Kebijakan Pemerintah**

Sejak terdeteksi kasus Covid 19 di Indonesia, pemerintah mengupayakan berbagai kebijakan untuk memerangi pandemi tersebut. Kebijakan yang dibuat selama pandemi ini berdampak signifikan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kecil. Ketidakpastian kebijakan pembatasan sosial menambah keresahan sebagian masyarakat yang keuangannya masih tertekan atau berada dalam masa krisis (Ristyawati, 2020). Kebijakan pemerintah ini merupakan salah satu celah ketimpangan dalam masyarakat, khususnya dalam perekonomian. Pasalnya, pemerintah hanya fokus pada satu perspektif saat mengambil keputusan, seperti kebijakan yang berbasis kesehatan dan keselamatan publik sehingga banyak masalah ekonomi yang begitu mengkhawatirkan dikesampingkan. Pemerintah menerapkan kebijakan yang menyebabkan kesulitan publik terhadap kesehatan dan perekonomian (Maliana, 2021).

Kondisi pandemi yang mempengaruhi perekonomian di beberapa sektor membuat beberapa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi PHK juga menjadi salah satu penyebab pendapatan masyarakat menurun namun tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-hari yang masih menuntut. Berbeda dengan sebagian pegawai negeri dan orang kaya lainnya, mereka memiliki pendapatan yang stabil bahkan ada yang memperoleh kekayaan selama pandemi ini. Hal ini membutuhkan perhatian pemerintah segera agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial jangka panjang.

**3. Banyaknya oknum pengambil keuntungan dalam kesulitan**

Pandemi Covid 19 ini secara nyata mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat, namun juga tidak sedikit yang justru mendapatkan keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang didapatkan menyebabkan kerugian yang semakin parah bagi

masyarakat kecil. Para oknum yang sengaja mengambil keuntungan di tengah kesulitan keadaan tanpa memikirkan masyarakat lainnya. Melalui penimbunan masker dan alat protokol kesehatan lainnya untuk dijual belikan dengan harga yang relatif tinggi. Masyarakat kecil yang tidak dapat melakukan hal serupa hanya dapat pasrah membeli barang yang mahal tersebut guna memenuhi aktivitasnya yang mengharuskan berada di luar rumah ataupun menjaga kesehatannya.

Tidak jarang terdengar berita korupsinya bantuan sosial oleh oknum pejabat yang seharusnya ditujukan untuk membantu masyarakat kecil membangkitkan perekonomiannya, padahal sebagian dari oknum seharusnya mengetahui betapa butuhnya bantuan tersebut untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun, bagi mereka yang tidak memperdulikan itu hanya memikirkan bagaimana caranya dapat hidup lebih banyak bergelimpang harta. Hal tersebut merupakan bentuk keegoisan oknum pejabat, karena nyatanya pejabat dari awal sudah berjanji dipilih untuk bertanggung jawab terhadap rakyatnya, salah satunya melindungi rakyatnya dari kemiskinan.

**4. Adanya globalisasi**

Pengaruh globalisasi begitu kuat sehingga mampu mendobrak berbagai sekat yang membuat dunia terbuka dan saling membutuhkan. Di sisi lain, globalisasi menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial baik sebelum maupun sesudah Covid-19. Kesenjangan ini disebabkan masyarakat tidak dapat beradaptasi dengan globalisasi Era Industri 4.0. Sementara, di masa pandemi ini bentuk globalisasi Era industri 4.0 seperti teknologi menjadi sangat dibutuhkan bahkan menjadi tempat bergantungnya masyarakat dalam menyesuaikan keadaan.

Globalisasi yang berkaitan dengan teknologi ini tidak hanya berdampak pada masyarakat karena ketidaksiapannya saja, melainkan juga dengan hadisnya globalisasi teknologi masyarakat seakan-akan menghilangkan nilai kepedulian sosial, gotong royong dan nilai-nilai kebangsaan lainnya yang sejak dahulu sudah dipertahankan. Masyarakat lebih acuh dengan lainnya yang sedang membutuhkan bantuan perekonoamian dan lebih memikirkan bagaimana dapat meraup keuntungannya sendiri melalui teknologi yang sudah dikuasi.

Mengetahui banyaknya faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan, perlu adanya perhatian lebih oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Solusi untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid 19 terhadap perekonomian terutama terhadap kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, pemerintah telah mengupayakan beberapa bantuan diantaranya sumbangan dana bagi UMKM yang terdampak Covid sehingga dapat berjalan dan dikembangkan kembali, adanya subsidi listrik dan kuota belajar sehingga dapat membantu meringankan beban biaya yang dikelaurkan oleh suatu rumah tangga, adanya kartu prakerja guna membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Melalui perhatian-perhatian tersebut, harapannya ketimpangan ekonomi dapat teratasi sehingga tidak berdampak pada kecemburuan sosial yang berkepanjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Meskipun,

pemerintah harus menambah pengeluannya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang bermunculan saat pandemi Covid 19.

## KESIMPULAN

Covid 19 menjadi wabah yang sangat mengancam banyak aspek, terutama aspek ekonomi. Banyaknya kegiatan yang terhambat akibat dari fenomena tersebut. Pemerintah terpaksa menerapkan kebijakan yang dianggap hanya melihat dari satu sudut pandang demi memutus rantai penyebaran. Kebijakan yang mengesampingkan sudut pandang ekonomi ini, merugikan banyak masyarakat kecil, banyak yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan harus lebih banyak di rumah dan tampatnya bekerja sudah tidak lagi beroperasi. Sementara itu, ada banyak faktor yang semakin mendukung masyarakat kecil ini hidup semakin susah di era Covid 19. Oknum yang gemar mengambil keuntungan ditengah kesulitan, seperti dengan sengaja menimbun alat kesehatan untuk dijual dengan harga yang relatif tinggi, sedangkan masyarakat kecil hanya dapat pasrah dan terpaksa membeli dengan uangnya yang tidak seberapa, maraknya korupsi bantuan sosial oleh pejabat mengakibatkan bantuan tidak tersalurkan secara merata, banyaknya pejabat yang mengalami kenaikan aset secara misterius. Fenomena-fenomena tersebut berakibat pada ketimpangan ekonomi khususnya ketimpangan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat kecil dan masyarakat/pejabat kaya lainnya. Ketimpangan yang terlihat dan terasa nyata di tengah masyarakat ini menimbulkan suatu kecemburuan sosial terlebih pada pejabat negara.

Kondisi Covid yang mengacaukan perekonomian ini, mendapatkan beberapa perhatian dari pemerintah. Bantuan dana untuk UMKM agar tetap berjalan dan berkembang, bantuan subsidi listrik dan kuota pendidikan untuk mengurangi beban biaya pengeluaran rumah tangga, kartu prakerja untuk membantu masyarakat yang telah kehilangan pekerjaanya. Solusi-solusi tersebut telah diterapkan pemerintah sehingga perekonomian masyarakat kembali bangkit dengan harapan perekonomian negara turut kembali meningkat karena kembalinya pendapatan negara dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh warganya.

## DAFTAR PUSTAKA


Arianto, B. (2021) 'Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia', *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), pp. 106–126. Available at: https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665.

Arifin, A. (2021) 'Ketimpangan Sosial dalam Penegakan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pontianak', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), p. 89. Available at: https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.420.

Asy'ariati, F.A. *et al.* (2022) 'Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung', *E-journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship*, 1(1), pp. 11–21. Available at: https://doi.org/10.23960/efebe.v1i1.23.

Dwi Putra Santoso, F. and Mukhlis, I. (2021) 'Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia', *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(2), pp. 146–162. Available at: https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p146-162.

Estri, P. and Nanang, F. (2021) 'Karta raharja', *Profil Peternak sapi perah di dataran rendah malang*, 3(2), pp. 29–40.

Fatma, L. *et al.* (2022) 'Kawasan Wisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul the Impact of the Covid-19 Pandemic on Community Income in the South Beach Tourism Area , Bantul District', 24(3), pp. 1553–1562.

Firdaus, Muhammad (2013) Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. Orasi ilmiah guru besar tetap Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor.

Ginsburgh, V., Magerman, G. & Natali, I. 2021. COVID-19 and the role of inequality in French regional departments. Eur J Health Econ 22, 311–327 . https://doi.org/10.1007/s10198-020-01254-0

Hadiwardoyo, W. (2020a) 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), pp. 83–92. doi: 10.24853/baskara.2.2.83-92.

Hadiwardoyo, W. (2020b) 'KERUGIAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19', *Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2).

Hidayadi, T., Achmad, D. and Niam2, M. (2022) 'Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah Jabodetabek Pada Masa Pandemi Covid 19', *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 6(1), pp. 117–130.

Ikmal, N.M. and Noor, M. (2022) 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19', *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), pp. 155–167. Available at: https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.910.

Irawan, A.D. and Sulistyo, A.Q.P. (2022) 'Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan

Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat', *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), pp. 251–262. Available at: https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184.

Jack Cordes, Marcia C. Castro. 2020. Spatial analysis of COVID-19 clusters and contextual factors in New York City, Spatial and Spatio-temporal Epidemiology,Vol 34, ISSN 1877-584

Jayanthi, R. and Dinaseviani, A. (2022) 'Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia selama Pandemi COVID-19', *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 24(2), pp. 187–200.

Mahadi, T. (2020) *Ekonomi Indonesia pada Tahun 2020 Berlangsung Dramatis, Kontan*

Maliana, I. (2021) *Faktor Kekayaan Pejabat Meningkat Drastis Selama Pandemi Pengamat Pengeluarannya Berkurang, tribunnews*. Available at: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/13/faktor-kekayaan-pejabatmeningkat-drastis-selama-pandemi-pengamat-pengeluarannya-berkurang.

Masa, P., Covid, P. and Sosiologis, R. (2021) 'Artikel Pembicara Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur', 1, pp. 1–6.

Mei, V.N. *et al.* (2023) 'PENDAPATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA SEBELUM DAN SEMASA PANDEMI COVID-19', (5), pp. 97–108.

PH, L. *et al.* (2020) 'Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa', *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), pp. 37–48. Available at: https://doi.org/10.37287/ijnhs.v1i1.225.

Putra, S.D.E. (2020) '( Pand ) Economics : Refleksi atas Sistem Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Covid-19 Sejak perusahaan mobil Ford merevisi cara kerja produksi , " semua meningkat karena efisiensi waktu dan dalam menghasilkan barang produksi terganggu , karena bidang produk', *Jurnal PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 5(2), pp. 17–29.

Rahayu, P. *et al.* (2021) 'Indikator Ketimpangan Dalam Pembangunan Dan Penyebaran Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten', *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), pp. 231–244. Available at: https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.231-244.

Rahmawati, A. *et al.* (2021) 'Dampak Pandemic Covid- 19 Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan', *Efektor*, 8(1), pp. 79–88. Available at: https://doi.org/10.29407/e.v8i1.15708.

Retnaningsih, H. (2020) 'Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah', *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11(2), pp. 215–227. Available at: https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1756.

Sani, S.R. *et al.* (2022) 'Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), p. 107. Available at: https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.499.

Setyadi, S. and Indriyani, L. (2021) 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Anak', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4, pp. 1–11. Available at: https://spektrumonline.com/2020/11/11/dampak-pandemi-covid-19-multidimensi/.

WHO. 2018. Health inequities and their causes. [internet] diakses mei 2022 tersedia pada https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/health-inequities-and-their-causes#:~:text=The%20lower%20an%20individual's%20socio,both%20to%20individuals%20and%20societies.

Yusuf, R., Hendawati, H. and Wibowo, L.A. (2020) 'Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan', *Jurnal Manajemen Pendidikan dan iImu Sosial*, 1(2), pp. 506–515. Available at: https://doi.org/10.38035/JMPIS.